

MENGEFEKTIFKAN FUNGSI PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN UNTUK MENGATASI PERSOALAN MUTU PERGURUAN TINGGI

H. sabil handaling *)

Abstract : To increase quality of output of college, hence entrepreneurship education especially at curriculum aspect, student, dosen, process study, and the aspect participate society represent strategic aspect. The components represent element in system of national education, but during the time not yet functioned better so that expectation of the increasing of education quality not yet also be reached.

Keywords: Education, Entrepreneur, quality

Pendahuluan

Agenda pembangunan pendidikan suatu bangsa tidak akan pernah berhenti dan selesai. Ibarat patah tumbuh hilang berganti, selesai memecahkan suatu masalah, muncul masalah lain yang kadang tidak kalah rumitnya. Begitu pula hasil dari sebuah strategi pemecahan masalah mutu Perguruan Tinggi yang ada, tidak jarang justru mengundang masalah baru yang jauh lebih rumit dari masalah awal. Itulah sebabnya pembangunan bidang pendidikan tidak akan pernah ada batasnya. Selama manusia ada, persoalan mutu Perguruan tinggi tidak akan pernah hilang dari wacana suatu bangsa. Oleh karena itu, agenda pendidikan kewirausahaan ada dan berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat suatu bangsa.

Bangsa Indonesia tidak pernah berhenti membangun sektor kewirausahaan dengan maksud agar kualitas sumber daya manusia yang dimiliki mampu bersaing secara global. Jika dernikian halnya, persoalan unggulan kompetitif bagi lulusan suatu Perguruan Tinggi sangat perlu untuk dikaji dan diperjuangkan ketercapaiannya dalam proses belajar mengajar oleh semua lembaga Perguruan Tinggi di negeri ini agar mampu menegakkan akuntabilitas kepada masyarakatnya.

Untuk dapat melakukan hal-hal yang demikian, Perguruan Tinggi perlu melakukan berbagai upaya ke arah peningkatan kualitas secara berkesinambungan. Tanpa ada peningkatan kualitas secara

berkesinambungan, Perguruan Tinggi itu akan terjebak pada upaya sesaat dan hanya bersifat tambal sulam yang reaktif. Upaya yang demikian itu tidak akan mampu memecahkan persoalan mutu lulusan yang sedang dan akan kita hadapi pada era milenium ini.

Sebaliknya, agar Perguruan Tinggi mampu mendorong semua proses pemberdayaan bangsa, ia harus direncanakan dan diprogramkan secara sistematis dan proaktif. Untuk dapat melakukan hal ini, kita perlu melakukan upaya-upaya yang bersifat reflektif dan reformatif. Upaya yang bersifat reflektif perlu dilakukan agar kita tidak mengulang hal-hal yang keliru di masa lampau. Bukan itu saja, dengan upaya yang bersifat reflektif, akhirnya kita akan mampu memberi makna suatu program dan proses pendidikan secara lebih kontekstual. Dengan cara seperti itu, pada akhirnya institusi pendidikan dapat membumikan programnya untuk memberdayakan para mahamahasiswa.

Bukan sebaliknya, para mahasiswa yang justru harus dikendalikan agar cocok dan sesuai dengan program serta proses yang telah ada di suatu institusi pendidikan tinggi. Kalau harus seperti itu sampai terjadi, pada akhirnya pendidikan akan terjebak pada kegiatan-kegiatan yang bersifat drilling. Kegiatan belajar mengajar yang demikian tidak akan mampu memperbaiki mutu lulusan di mana mahasiswa mencari jati dirinya secara lebih mandiri. Akhirnya, para mahasiswa tidak akan mampu

mengembangkan kemampuan imajinatif yang bermanfaat untuk menumbuhkan kreativitas yang inovatif.

Upaya yang bersifat reformatif dalam proses pendidikan juga sangat diperlukan agar pendidikan kita tidak berjalan di tempat. Tujuan utama melakukan upaya yang bersifat reformatif dalam sektor pendidikan ialah untuk melakukan rekonstruksi sosial ke arah bentuk masyarakat madani ideal seperti yang dicita-citakan. Dengan upaya yang reformatif, semua praktisi pendidikan yang bertentangan dengan proses demokratisasi kehidupan yang sehat, adil, dan berharkat, perlu disingkirkan.

Dengan paradigma yang demikian itu, rekonstruksi pendidikan kewirausahaan akan mampu membangun masyarakat menjadi masyarakat madani yang penuh dengan praktik-praktik kehidupan atas dasar kasih sayang antara sesama warga masyarakat secara egaliter. Makalah ini disusun untuk tujuan ikut serta memberikan bahan dan informasi kepada semua pihak yang memiliki komitmen terhadap pendidikan kewirausahaan. Sudah tentu informasi yang tercakup dalam makalah ini bukanlah segala-galanya, komprehensif, serta mampu mewakili semua praksis kebijakan, dan pengembangan sektor pendidikan. Dengan demikian, aspek-aspek penting yang akan mendapat sorotan dalam tulisan ini ialah kurikulum, mahasiswa, dosen, proses belajar mengajar, dan partisipasi masyarakat. Masalah Pokok dalam makalah ini adalah apakah upaya yang diperlukan dalam mengefektifkan fungsi pendidikan kewirausahaan dalam peningkatan mutu Perguruan Tinggi.

Mengefektifkan Pendidikan

Kewirausahaan

A. Kurikulum

Dalam bidang pendidikan, kurikulum merupakan unsur penting dalam setiap bentuk dan model pendidikan yang mana pun. Tanpa adanya kurikulum, sulit rasanya perencana pendidikan kewirausahaan dalam mencapai tujuan pendidikan

yang diselenggarakannya. Mengingat pentingnya peran kurikulum, maka kurikulum perlu dipahami dengan baik oleh semua pelaksana kurikulum.

Pada kenyataannya, sementara pihak memang ada yang memahami kurikulum itu hanya dalam arti kata yang sempit, yaitu kurikulum dipandang sebagai rencana pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan mahasiswa guna mencapai suatu tingkatan tertentu. Jika demikian adanya, maka dinamika proses belajar mengajar serta kreativitas dosen dan mahasiswa tidak akan terhenti. Dosen dan mahasiswa hanya terhenti pada sasaran materi yang dicanangkan pada buku kurikulum itu saja tanpa memperhatikan aspek lain yang telah berkembang begitu cepat di masyarakat. Di lain pihak memang ada yang memandang kurikulum dalam arti luas, yaitu kurikulum yang menyangkut semua kegiatan yang dilakukan dan dialami mahasiswa dalam perkembangan, baik formal maupun informal guna mencapai tujuan pendidikan.

Beane (1986) membagi kurikulum dalam empat jenis, yaitu (1) kurikulum sebagai produk, (2) kurikulum sebagai program, (3) kurikulum sebagai hasil belajar yang diinginkan, dan (4) kurikulum sebagai pengalaman belajar bagi mahasiswa. Hal ini seiring dengan pendapat Said Hamid Hasan (1988) yang berpendapat bahwa setidaknya terdapat empat dimensi kurikulum, yaitu (a) kurikulum sebagai suatu ide atau konsepsi, (b) kurikulum sebagai rencana tertulis, (c) kurikulum sebagai suatu kegiatan atau proses, dan (d) kurikulum sebagai hasil belajar.

Kurikulum Program Studi dalam arti produk masih mengandung banyak kerancuan. Sekolah-sekolah di tingkat SMA serta SMK memiliki kurikulum yang amat sarat dengan mata pelajaran. Dampak nyata yang terlihat ialah daya serap peserta didik tidak optimal dan mereka cenderung belajar tentang banyak hal, tetapi dangkal. Kurikulum 1975 dirasakan amat membengkak dan sangat gemuk di samping kurikulum tersebut dalam arti program terlalu

berorientasi pada produk belajar, bukannya proses belajar. Kemudian kurikulum itu direvisi lagi dengan munculnya kurikulum 1984 yang konon telah mementingkan proses belajar dan perampingan. Namun perampingan itu juga tidak tuntas, sehingga ada komentar bahwa Kurikulum 984 itu ramping, tetapi “montok”. Akibatnya juga mengundang rendahnya daya serap para peserta didik.

Persoalan lain yang dianggap cukup urgen dalam kurikulum ialah tumpang tindih baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertical materi di semester satu muncul lagi di semester dua atau semester tiga untuk mata pelajaran yang sama. Sedangkan secara horizontal muncul berbagai pokok bahasan yang sama pada beberapa mata pelajaran yang berbeda. Kesemuanya itu tentu tidak akan menguntungkan bila dilihat dan proses belajar mengajar, mahasiswa akan merasa jemu untuk mengikutinya.

Masalah berikutnya yang berkaitan dengan aspek kurikulum dalam arti proses belajar dan pengalaman belajar memiliki kaitan yang erat dengan perilaku dosen di depan kelas dalam konteks belajar mengajar. Kurikulum dalam arti produk hanya seperti blueprint bagi suatu proses membangun sebuah gedung yang monumental. Bagaimanapun bagus blueprint yang telah disiapkan oleh seorang arsitektur, blueprint tersebut akan tidak bermakna tanpa adanya pelaksana yang kompeten dalam bidang bangunan di lokasi gedung yang akan didirikan itu. Analog ini, artinya kurikulum masih memerlukan intervensi dan kearifan seorang dosen yang akan mengajarkannya di depan kelas.

Kurikulum dari program studi manajemen bisnis yang praktis disusun secara bertahap mengenai cara mengembangkan ide bisnis, implementasi ide dan cara mengembangkan bisnisnya. Program studi menggunakan berbagai metode pelatihan yang lebih menekankan dinamika interaksi dan umpan balik antara peserta pelatihan sebagai sumber pembelajaran. Dengan demikian kurikulum ini dapat

member pengalaman dan pembelajaran yang tepat dan handal mengenai dunia usaha untuk menciptakan pengusaha yang tangguh, lebih focus dan cerdas memposisikan bisnisnya menjadi lebih berdaya saing ditengah persaingan bisnis yang sangat ketat (*hyper competitive*) dewasa ini.

B. Mahasiswa

Untuk menciptakan pengusaha yang tangguh berdasarkan kompetensi utamanya dalam berbisnis. Kegiatan ini dimulai dengan memahami siklus bisnis, mengenal potensi diri dalam berbisnis, mengenal potensi pasar dan kemudian menyusun rencana usaha sebagai modal awal dalam berbisnis. Proses mengembangkan usahanya akan menjadi lebih tangguh menghadapi persaingan dunia usaha yang semakin kompleks saat ini.

Mahasiswa memiliki alasan dan legitimasi yang amat strategik. Suyanto (2000) menyatakan bahwa “angkatan kerja kita saat ini sebagian besar, kurang lebih 76%, hanya memiliki pendidikan tidak lebih dari sekolah dasar. Kondisi seperti ini cukup mencemaskan jika harus bersaing secara global dalam berbagai aspek kehidupan. Kita tidak dapat lagi menjadikan jumlah penduduk yang besar dengan upah yang murah sebagai salah satu daya tarik investor asing untuk ikut menanamkan modal di Indonesia. Justru kualitas penduduk yang perlu dijadikan sebagai daya tarik bagi para investor asing untuk memasuki Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena pada abad ke-21, ciri penting pola hubungan antarnegara dan bangsa ialah adanya interdependensi satu sama lain. Jika kita tidak dapat menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi maka kita akan banyak mengalami kerugian dalam pola hubungan antarbangsa seperti itu.

Permasalahan yang ada bahwa wajib belajar sembilan tahun hanya enak diucapkan, didengar, disemboyankan, apalagi dinyanyikan. Sebagian besar bangsa ini tentu mengetahui makna wajib belajar sembilan tahun. Akan tetapi, belum tentu semua warga Negara di republik tercinta ini sadar akan anti penting wajib belajar bagi

kehidupan global bangsa di abad ke-21. Oleh karena itu, wajib belajar sembilan tahun perlu diimplementasikan dengan berbagai strategi yang terpadu dan sistematis secara rapi. Pendekatan melalui jalur pendidikan sekolah saja belum tentu menjamin keberhasilan wajib belajar sembilan tahun. Mengapa demikian ? Karena wajib belajar tidak semata-mata berurusan dengan pembebasan SPP untuk para pelajar sampai dengan tingkat SMP.

Namun jauh lebih rumit sebab berurusan dengan faktor-faktor lainnya seperti anti ekonomi anak bagi orang tua terhadap pendidikan, aspirasi pendidikan masyarakat, budaya masyarakat, dan sebagainya. Masalah berikutnya adalah masalah yang merupakan dampak negative dan perkembangan ilmu dan teknologi terhadap anak-anak pada era globalisasi ini. Perubahan teknologi yang sangat cepat dan disertai adanya semangat globalisasi akan membawa perubahan cara hidup masyarakat. Dalam perubahan itu anak-anak tidak sedikit yang menderita. Oleh karena itu, persoalan yang dihadapi oleh anak-anak Indonesia menjadi semakin beragam.

Anak-anak Indonesia akan mengalami krisis idola nasional sebagai akibat begitu meledaknya teknolog komunikasi lewat TV yang bersifat global. Lebih parahnya lagi lahan tempat bermain anak-anak menjadi semakin sempit, bahkan di kota-kota besar anak-anak memang telah mengalami kesulitan untuk mencari tanah lapang yang dapat digunakan untuk bermain.

Masalah lainnya yang berkaitan dengan mahasiswa adalah masalah mahasiswa yang memiliki kemampuan luarbiasa. Dalam UUSPN anak-anak yang memiliki bakat istimewa, yaitu mereka yang super pintar memang memperoleh jaminan untuk bisa diperlakukan atau dididik secara khusus. Pasal 8 ayat (2) dan UUSPN menyatakan bahwa “Warga Negara yang memiliki kemampuan dan Kecerdasan luarbiasa berhak memperoleh perhatian khusus.” Namun demikian, pelaksanaan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam pasal (2) tersebut masih harus ditetapkan dengan keputusan menteri. Inilah yang perlu segera diperhatikan oleh Departemen Pendidikan Nasional, agar sistem pendidikan kita segera bisa membenarkan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang memiliki kecerdasan luar biasa.

C. Dosen

Berkaitan dengan kualitas dosen ini, Raka Joni (1980) mengemukakan adanya tiga dimensi umum yang menjadi kompetensi tenaga kependidikan, antara lain:

1. Kompetensi personal atau pribadi, maksudnya seorang dosen harus memiliki kepribadian yang mantap yang patut diteladani. Dengan demikian, seorang dosen akan mampu menjadi seorang pemimpin yang menjalankan peran: *ing ngarso sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*.
2. Kompetensi professional, maksudnya seorang dosen harus memiliki pengetahuan yang luas, mendalam dan bidang studi yang diajarkannya, memilih dan menggunakan berbagai metode mengajar di dalam proses belajar mengajar yang diselenggarakannya.
3. Kompetensi kemasyarakatan, artinya seorang dosen harus mampu berkomunikasi baik dengan mahasiswa, sesama dosen, maupun masyarakat luas.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dosen yang akan dibahas dalam makalah ini diantaranya program penataran. Penataran yang selama ini dilakukan dalam berbagai bentuk dan materi memang memiliki legitimasi akademik yang tinggi di bawah paradigma *in-service-training*, namun demikian, sebenarnya penataran itu saja masih belum mampu melakukan intervensi secara makro terhadap perbaikan praktis pendidikan. Indikator yang paling mudah diketahui ialah masih rendahnya nilai ujian nasional.

Fenomena itu menggambarkan bahwa hasil penataran tidak bisa diadopsi oleh dosen kita pada proses pembelajaran

di kelas. Memang banyak dosen yang pada waktu ditatar menunjukkan prestasi yang baik dan menakjubkan, tetapi setelah pulang ke kampus mereka kembali pada praktik lama, yaitu tidak mau menerapkan hasil penataran pada proses pembelajaran kelas masing-masing.

Keengganan menerapkan hasil penataran merupakan gejala umum bagi dosen di mana saja dan di jenjang pendidikan mana pun, Hal ini terjadi karena materi penataran sebenarnya tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan cara dosen.

D. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran yang ideal adalah proses pembelajaran yang dikemas dengan memperhatikan adanya berbagai aspek baik itu kognitif, afektif, maupun psikomotor. Apabila proses pendidikan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan adanya keseimbangan ketiga aspek tersebut maka output pendidikan akan mampu mengantisipasi perubahan dan kemajuan masyarakat. Sebaliknya, apabila proses pembelajaran mengabaikan aspek-aspek tersebut dan hanya menitikberatkan pada aspek kognitif saja, jadinya akan lain. Jangan diharap output Perguruan Tinggi mampu menerjemahkan serta merta mengantisipasi kemajuan dan perkembangan masyarakat yang telah berjalan demikian cepat. Oleh sebab itu, Perguruan Tinggi kita harus mampu mengemas proses pendidikan dengan baik. Dengan kata lain, proses belajar mengajar kita harus memperhatikan aspek kreativitas, yang dicirikan dalam pendidikan kewirausahaan. Pengembangan kreativitas para mahasiswa yang dimulai sejak awal akan mampu membentuk kebiasaan cara berpikir yang sangat bermanfaat dirinya sendiri di kemudian.

Beberapa pakar wirausaha mengatakan secara umum, jiwa dan kepribadian seorang wirausahawan itu paling tidak dipengaruhi oleh dua hal, yaitu bakat dan lingkungan. Pada sisi lingkungan setidaknya di bagi ke dalam dua hal yang sama-sama memberikan kontribusi besar dalam membentuk jiwa kewirausahaan, yaitu

pengalaman dan pendidikan. Permasalahannya adalah bagaimana mendisain pendidikan dalam waktu relative singkat yang mampu menciptakan lingkungan yang kondusif yang dapat membentuk wirausahawan.

Kenyataan yang ada saat ini, hampir semua sistem perguruan tinggi yang ada di negeri ini kurang menyentuh dan mengembangkan aspek kreativitas. Ini terjadi akibat tuntutan kurikulum 1975 yang sangat berorientasi pada hasil belajar. Kurikulum tersebut akhirnya diperbaiki, kemudian muncul kurikulum 1984 yang sedikit bergeser orientasinya kearah proses. Namun, praktis pendidikan telanjur berpihak pada orientasi produk. Oleh karena itu, pergeseran orientasi itu tidak semudah yang dibayangkan para pengambil kebijakan dalam sistem perguruan tinggi kita.

Kurikulum 1994 secara filosofis sangat menaruh perhatian terhadap proses pembelajaran yang dinamis sehingga system target dan produk harus terjemahkan secara kreatif dan kontekstual. Namun, pada kenyataannya sebagian besar dosen telah merasa mapan dengan semangat kerja model Kurikulum 1984, dosen telanjur mekanistik dalam proses pembelajaran di kampus, akhirnya persoalan kreativitas masih saja terabaikan tidak tersentuh. Hal ini terjadi karena terlalu saratnya muatan yang diemban oleh kurikulum 1994. Dengan demikian hal pokok yang dikembangkan tetap aspek kognitif, sementara afektif dan psikomotor tetap terabaikan.

E. Partisipasi Masyarakat

Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sstem Pendidikan Nasional pasal 54 ayat 2 menyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Peran serta tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pendidikan berbasis kewirausahaan sehingga pendidi-

kan tetap memiliki keterkaitan dengan kondisi dan tuntutan masyarakat. Sementara untuk mewadahi peran serta masyarakat dibentuklah satu institusi yang bersifat independent dengan dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota, sementara untuk tingkat persekolahan dikenal dengan istilah komite sekolah. Peran serta masyarakat yang berbentuk yayasan nirlaba telah bias dilihat dengan nyata dalam ikut serta menyelenggarakan pendidikan baik di tingkat dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi. Suyanto (2000) menyatakan saat ini paling tidak yayasan-yayasan pendidikan yang ada dalam masyarakat telah mampu mendirikan berbagai perguruan tinggi. Namun hal tersebut tidak serta merta memberikan hal yang membahagiakan kita sebab masih terdapat kecenderungan bahwa penyelenggaraan pendidikan oleh Perguruan Tinggi swasta tersebut masih belum memenuhi kualitas yang diharapkan.

Dengan demikian, untuk melibatkan peran serta masyarakat pengusaha harus diawali dan proses sosialisasi yang positif. Pemerintah perlu meyakinkan bahwa dengan ikut serta dalam pengembangan system pendidikan nasional, para pengusaha juga akan memetik keuntungan berupa sumber daya manusia yang berkualitas bagi perusahaan mereka.

PENUTUP

Uraian di atas telah menunjukkan beberapa butir analisis kritis terhadap pendidikan kewirausahaan terutama pada aspek kurikulum, mahasiswa, dosen, proses pembelajaran, dan aspek partisipasi masyarakat. Tentu saja, masih terdapat aspek-aspek lainnya yang cukup signifikan namun tidak dapat dikupas dalam makalah ini, hal ini terjadi mengingat waktu dan ruang yang terbatas.

Komponen-komponen tersebut merupakan unsur dalam sistem pendidikan nasional. namun selama ini belum berfungsi dengan baik sehingga harapan

meningkatnya mutu pendidikan belum juga tercapai. Untuk itu harapan penulis bahwa dengan melakukan berbagai upaya untuk menfungsikan system pendidikan kewirausahaan di Perguruan Tinggi, maka diharapkan dapat mengatasi persoalan mutu Perguruan Tinggi.

DAFTAR RUJUKAN

- Beane, J.A. and Toepfer, C.F. et al. 1986. *Curriculum Planning and Development*, Boston.
- Raka, Joni. 1980. *Pengembangan Kurikulum LKIP/FIP/PKG: Suatu Kasus Pendidikan Dosen Berdasarkan Kompetensi*. P3G, Jakarta.
- Sindhunata. 2001. *Pendidikan: Kegelisahan Sepanjang Zaman*. Kanisius, Yogyakarta.
- Surya, Mohamad, 2004. *Implikasi Kebijakan Otonomi daerah terhadap Tuntutan Pengembangan Sumber daya Manusia*. Makalah dalam Seminar Sehari Dalam rangka Dies Natatis I Universitas Kuningan, tanggal 17 Juni 2004, di Kuningan.
- Suyanto dan Djihad Hisyam. 2000. *Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III*, Adicita Karya Nugraha, Yogyakarta.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- *) Penulis adalah Dosen Tetap Yayasan Pendidikan **Nobel Indonesia** Makassar